

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Konstelasi geopolitik saat ini ditandai oleh dinamika interaksi antarnegara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, pertahanan, dan aliansi strategis. Adapun beberapa fakta konstelasi geopolitik yang terjadi beberapa tahun terakhir seperti ketegangan yang terjadi di Eropa Timur pada saat Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada tahun 2022 yang mengakibatkan Rusia mendapat sanksi ekonomi dari negara-negara barat sehingga mendorong Rusia memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia sebagai bentuk pengurangan dampak isolasi internasional.<sup>1</sup> Kemudian terdapat salah satu bentuk perkembangan geopolitik global yang dilakukan oleh negara-negara dalam upaya penguatan aliansi dan militer, seperti Australia yang memutuskan untuk meningkatkan kapabilitas militer dengan membeli rudal jelajah Tomahawk dari Amerika yang dianggap sebagai respon terhadap dinamika keamanan regional.<sup>2</sup> Dalam konstelasi geopolitik global terdapat upaya kerja sama internasional yang memiliki peran krusial dalam menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan global. Di era globalisasi, negara-negara semakin saling bergantung dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, negara dapat memperluas akses perdagangan, meningkatkan investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi melalui

---

<sup>1</sup> Reuters Staff, "Russian Official Visits Indonesia and Malaysia to Talk Defence, Russian Agencies Report," Reuters, February 24, 2025, <https://www.reuters.com/world/russian-official-visits-indonesia-malaysia-talk-defence-russian-agencies-report-2025-02-24/>.

<sup>2</sup> Ermaya Suradinata, "Geopolitik Dan Geostrategi Pertahanan Kawasan," Kompas.id (Harian Kompas, April 11, 2023), last modified April 11, 2023, diakses 1 Maret, 2025 <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/09/geopolitik-dan-geostrategi-pertahanan-kawasan>.

diversifikasi mitra dagang.<sup>3</sup> Dalam bidang politik dan diplomasi, kerja sama internasional memungkinkan negara untuk membangun aliansi strategis, mencegah konflik, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global. Selain itu, kolaborasi dalam bidang keamanan membantu dalam menangani ancaman transnasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan siber.<sup>4</sup> Kerja sama internasional juga berperan dalam pengembangan sosial dan kemanusiaan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Bantuan kemanusiaan dan pertukaran pengetahuan antar negara dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai belahan dunia.<sup>5</sup> Salah satu partisipasi Indonesia dalam konstelasi geopolitik global terdapat pada partisipasi Indonesia pada KTT G7. Meskipun bukan anggota tetap kehadiran Indonesia dalam forum G7 menunjukkan pengakuan terhadap peran strategisnya di kawasan Asia Tenggara dan sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang. Indonesia memanfaatkan platform ini untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan Global South, mendorong kerja sama multilateral yang inklusif, serta menarik investasi asing untuk proyek-proyek strategis nasional, seperti pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).<sup>6</sup>

BRICS menjadi salah satu kerja sama internasional perkembangan geopolitik global yang bertujuan untuk mereformasi tata kelola global, dan melakukan

---

<sup>3</sup> None Ahmad Fanani, None I Wayan Midhio, and None Afrizal Hendra, "Tantangan Pertahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045," *TheJournalish Social and Government* 5, no. 4 (December 27, 2024): 379–391

<sup>4</sup> I. A. Sarjito, E. P. Duarte, dan S. Sos, *Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global* (Indonesia Emas Group, 2023)

<sup>5</sup> Abd Haris et al., "Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana Dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisiasi Kebijakan Untuk Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 4 (December 30, 2023): 314–324.

<sup>6</sup> Indonesia Business Post, "Jokowi Seizes Opportunity at G7 Summit to Attract Investors for Key Projects," <https://Indonesiabusinesspost.com/>, last modified 2023, diakses 18 April, 2025

pembangunan berkelanjutan melalui NDB (New Development Bank) sebagai pendana untuk proyek infrastruktur dan energi bersih.<sup>7</sup> BRICS merupakan akronim dari Brazil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang juga merupakan bentuk aliansi ekonomi yang menawarkan alternatif terhadap dominasi barat terhadap sistem global dengan populasi sebesar 42% dan menjadi kontribusi terhadap PDB global sebesar 23%.<sup>8</sup>

Secara resmi Indonesia bergabung dengan BRICS pada Januari 2025 dengan harapan meluasnya kerja sama internasional dalam berbagai bidang. Indonesia berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan agenda BRICS, termasuk dalam pertemuan puncak tingkat tinggi yang membahas kerja sama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik.<sup>9</sup> Setelah resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, Indonesia mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam lanskap politik dan ekonominya. Keanggotaan ini memperluas akses perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota lain seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Rusia, yang sebelumnya telah menjadi mitra dagang utama Indonesia. Misalnya, nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara BRICS pada tahun 2024 mencapai sekitar USD 150 miliar, terutama dari sektor batu bara, CPO, dan gas alam.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Achmad Alfaron Alamsyah, "Peran Cina Dalam Mengoptimalkan Kerjasama Ekonomi BRICS Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Bersama," *Jurnal Perdagangan Internasional* 1, no. 2 (13 November, 2023): 112-127, diakses 7 Juni, 2024, <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jpi/article/view/1533>.

<sup>8</sup> Mario Sáez, "Qué Son Los BRICS, Cuántos Países Forman Parte, Para Qué Sirve YCuál Es Su Función," *Diario AS*, last modified January 21, 2025, diakses 1 Maret, 2025, <https://as.com/actualidad/politica/que-son-los-brics-cuantos-paises-forman-parte-para-que-sirve-y-cual-es-su-funcion-n/>.

<sup>9</sup> Irawan Sapto Adhi, "Daftar Anggota BRICS 2025 Usai Indonesia Resmi Bergabung," *KOMPAS.com* (Kompas.com, January 8, 2025), last modified January 8, 2025, diakses 24 Februari, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/08/123000965/daftar-anggota-brics-2025-usai-indonesia-resmi-bergabung>.

<sup>10</sup> GABRIELA SÁ PESSOA, "Indonesia Is Admitted to the BRICS Bloc of Developing Nations," *AP News*, last modified January 6, 2025, <https://apnews.com/article/brazil-brics-indonesia-membership-c05b0c8e2ae493f9046479e62a45d8fa>.

Secara diplomatik, Indonesia memanfaatkan keanggotaan ini untuk memperkuat posisi dalam isu-isu global, seperti reformasi sistem keuangan internasional dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara, sebagai bagian dari agenda “dedolarisasi” yang diusung BRICS.<sup>11</sup> Di balik keuntungan dan potensi yang ada, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga menimbulkan kekhawatiran diplomatik dengan negara-negara Barat terutama AS yang memandang inisiatif dedolarisasi dan sistem pembayaran alternatif BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi ekonomi mereka, berpotensi memicu tekanan tarif, pengurangan investasi, atau tindakan diplomatik terhadap Indonesia.<sup>12</sup> Selain itu, keanggotaan ini mensyaratkan Indonesia untuk mengikuti kerangka dan kebijakan internal BRICS termasuk transfer teknologi dan penggunaan mata uang lokal yang memerlukan reformasi domestik serta koordinasi lintas kementerian agar tidak merugikan kepentingan nasional.<sup>13</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Indonesia resmi menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025 di tengah konstelasi geopolitik antara Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap BRICS yang sekaligus mencerminkan ketegangan antara kekuatan mapan dan kekuatan baru yang menantang dominasi sistem internasional berbasis Barat. BRICS yang terdiri dari negara Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan berupaya menciptakan tatanan dunia

---

<sup>11</sup> Stanley Widiyanto, “Indonesia to Intensify Defence Partnerships and Maritime Security, Top Diplomat Says,” Reuters, January 10, 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-intensify-defence-partnerships-maritime-security-top-diplomat-says-2025-01-10/>.

<sup>12</sup> Amy Sood, “South China Morning Post,” South China Morning Post, last modified January 8, 2025, diakses 12 Juni, 2025, <http://scmp.com/week-asia/politics/article/3293828/indonesia-brics-strategic-hedge-or-challenge-us-interests?>

<sup>13</sup> Fitriani, “Joining BRICS, Indonesia Sticks with Multi-Alignment Strategy | the Strategist,” The Strategist, last modified January 16, 2025, <https://www.aspistrategist.org.au/joining-brics-indonesia-sticks-with-multi-alignment-strategy/>

multipolar yang lebih inklusif, terutama dalam aspek keuangan, perdagangan, dan tata kelola global. Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS di tengah konstelasi geopolitik negara-negara Barat yang melihat BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi dolar dan sekaligus menjadi ancaman untuk lembaga-lembaga.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Mengapa Indonesia bergabung dengan BRICS ditengah konstelasi geopolitik Amerika Serikat dan negara-negara BRICS ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Memberikan analisis alasan Indonesia bergabung dengan BRICS di tengah konstelasi geopolitik Amerika Serikat dan negara-negara BRICS.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menganalisis proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia terkait memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, dan diharapkan mampu menambah pembendaharaan konsep yang lebih kuat terkait masalah tersebut.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan pemangku kepentingan terkait, dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Setelah membaca beberapa literatur yang berkaitan terhadap penelitian ini, ditemukan beberapa artikel dan jurnal serta penelitian terdahulu yang dapat dirujuk dan menjadi sumber untuk menonjolkan perbedaan dari penelitian ini. Sumber pertama adalah jurnal

yang ditulis oleh Fransiscus Budi Iskandar dalam Jurnal Intelektual Sosial-Hukum Vol. 2 No. 1 (2024) yang berjudul "Implikasi Pembentukan Mata Uang Brics Terhadap Kedaulatan Ekonomi Indonesia". Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi manfaat dan tantangan yang dihadapi Indonesia jika bergabung dalam sistem mata uang BRICS. Jurnal ini menyoroti keuntungan seperti penguatan ekonomi dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS, namun juga memperingatkan tentang potensi hilangnya ruang kebijakan ekonomi domestik akibat integrasi ke dalam blok ekonomi yang memiliki kepentingan beragam.<sup>14</sup> Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, pada penelitian ini fokus terletak pada mengapa Indonesia memutuskan tetap bergabung dengan Brics di tengah konstelasi geopolitik global yang ada.

Ditemukan juga penelitian terdahulu dengan tema serupa yang dilakukan oleh Jayanti Herawati di dalam jurnal Multidisiplin Inovatif dengan judul tulisan "Peran Politik Bebas Aktif dalam Kerja Sama Ekonomi Dunia : Studi Kasus Indonesia Bergabung Dalam Forum Internasional BRICS". Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia berperan dalam kerja sama ekonomi global, khususnya melalui partisipasi dalam forum BRICS. Jurnal ini mengeksplorasi alasan Indonesia bergabung dengan BRICS, dampak keanggotaannya, serta bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia selaras dengan prinsip politik bebas aktif.<sup>15</sup> Namun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pengaruh Indonesia tetap

---

<sup>14</sup> Franciskus Budi Iskandar, "Implikasi Pembentukan Mata Uang BRICS Terhadap Kedaulatan Ekonomi Indonesia," Jurnal Intelektual Sosial Hukum 2, no. 1 (2025), diakses 27 Februari, 2025, <https://jsh.intelektualhukum.com/index.php/jsh/article/view/27>

<sup>15</sup> Jayanti Herawati et al., "Jurnal Multidisiplin Inovatif : Peran Politik Bebas Aktif Dalam Kerja Sama Ekonomi Dunia : Studi Kasus Indonesia Bergabung Dalam Forum Internasional BRICS," Jurnalhst.com, last modified 2025, diakses 27 Februari, 2025, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jmi/article/view/5884>

memutuskan menjadi keanggotaan BRICS di saat terdapat dominasi barat terhadap geopolitik global.

Tulisan selanjutnya karya Alia Rahmatulummah dalam artikel jurnal yang berjudul *Journal of Strategic and Global Issues* dalam tulisan dengan judul “Opportunities to Advance Indonesia’s Economy Through OECD and BRICS”. Artikel ini membahas bagaimana keanggotaan Indonesia dalam OECD dan BRICS dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat posisi ekonomi dan politik Indonesia di tingkat global. Dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga komoditas, keterlibatan dalam kedua organisasi ini diharapkan membawa manfaat signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. OECD memberikan akses kepada Indonesia untuk mengadopsi praktik terbaik dan standar internasional, yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik serta daya saing ekonomi. Sementara itu, BRICS menawarkan peluang dalam memperluas pasar ekspor dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti ketimpangan ekonomi antar anggota BRICS serta kebutuhan untuk meningkatkan daya saing produk nasional agar lebih kompetitif di pasar internasional.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang tertuju pada mengapa Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS di tengah perkembangan geopolitik global yang terjadi.

Artikel berikutnya merupakan posisi geopolitik Indonesia di tengah dominasi negara barat, prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri yang berarti tidak terikat pada

---

<sup>16</sup> Alia Rahmatulummah, Bagas Rizky Ramadhan, dan Inas Alya Haura, “Opportunities to Advance Indonesia’s Economy through the OECD and BRICS,” *Jurnal Studi Global dan Strategis*, diakses 27 Februari 2025, <https://jurnal.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/jsjgs/article/view/49/30>.

blok kekuatan tertentu dan aktif berpartisipasi dalam forum internasional. Sebagai anggota G20 dan BRICS, Indonesia memperkuat peranannya dalam tatanan global yang multipolar, sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat dan kekuatan besar lainnya.<sup>17</sup> Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus menempatkan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai objek analisis kebijakan luar negeri yang dikaji menggunakan kerangka teori Balance of Threat dari Stephen M. Walt. Fokus utama skripsi ini bukan hanya pada makna geopolitik Indonesia dalam Global South, melainkan pada persepsi ancaman struktural yang mendorong Indonesia melakukan soft balancing terhadap dominasi Barat dalam sistem ekonomi dan keuangan global.

Selanjutnya, ada laporan riset parlemen (policy brief) dari Vollmer pada tahun 2023 yang menjelaskan perubahan struktur sistem internasional menuju tatanan multipolar, BRICS mengalami transformasi dari forum ekonomi menjadi aktor strategis dalam politik ekonomi global. Vollmer (2023) menjelaskan bahwa perluasan keanggotaan BRICS merupakan bagian dari upaya kolektif negara-negara berkembang untuk meningkatkan representasi Global South dalam tata kelola dunia serta mengurangi ketergantungan terhadap institusi internasional yang didominasi negara-negara Barat. Transformasi ini menempatkan BRICS bukan sekadar sebagai forum konsultatif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperluas ruang kebijakan ekonomi dan diplomatik negara-negara anggotanya. Dalam konteks Indonesia, keanggotaan dalam BRICS dapat dipahami sebagai langkah adaptif untuk memperkuat posisi tawar di tingkat

---

<sup>17</sup> Hadi Pradnyana, "Navigating Global Power Dynamics: Indonesia's BRICS Entry and the Future of Global South," *Modern Diplomacy*, 28 Oktober 2024, diakses 18 April 2025, <https://moderndiplomacy.eu/2024/10/29/navigating-global-power-dynamics-indonesias-brics-entry-and-the-future-of-global-south/>.

global sekaligus memperluas diversifikasi mitra ekonomi dan politik di tengah tekanan struktural sistem internasional yang masih didominasi kekuatan Barat.<sup>18</sup> Berbeda dengan itu, penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada Indonesia sebagai aktor negara dan menjadikan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sebagai fokus utama kajian. Skripsi ini tidak hanya menjelaskan latar belakang ekspansi BRICS, tetapi lebih jauh menganalisis mengapa Indonesia memilih bergabung di tengah konstelasi geopolitik antara Amerika Serikat dan negara-negara BRICS.

## **1.7 Kerangka Pemikiran**

### **1.7.1 Threat Perception**

Threat perception merupakan konsep dari Balance of Threat yang dijelaskan oleh Stephen M. Walt yang nantinya dikembangkan sebagai Balance of Power Theory melalui bukunya yang berjudul “The Origins of Alliances” yang menjelaskan bahwa negara tidak hanya membentuk aliansi karena kekuatan negara lain saja, melainkan karena ada anggapan negara tersebut sebagai ancaman (threat), sehingga persepsi terhadap ancaman atau perceived threat sangat menentukan dalam pembentukan aliansi dibandingkan hanya melihat kemampuan militer atau kekuatan saja.<sup>19</sup> Terdapat empat faktor utama yang membentuk persepsi ancaman :

- A. *Aggregate Power*, semakin besar kekuatan total suatu negara (ekonomi, militer, dan penduduk) maka semakin menjadi potensi ancaman
- B. *Geographic Proximity*, negara yang dekat secara geografis lebih mungkin dianggap sebagai ancaman.

---

<sup>18</sup> Patrick Vollmer, “The BRICS Group: Overview and Recent Expansion,” UK Commons Library, 29 Agustus 2023, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10136/>.

<sup>19</sup> Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1987), 5.

C. *Aggressive Intentions*, jika negara menunjukkan niat atau perilaku agresif (retorika atau kebijakan), maka ancamannya makin besar.

D. *Offensive Capability*, kapasitas untuk menyerang atau memproyeksikan kekuatan ke luar perbatasannya.<sup>20</sup>

Amerika Serikat sering dipersepsikan sebagai ancaman oleh banyak negara karena memenuhi keempat indikator ancaman dalam teori balance of threat oleh Stephen M. Walt. Pertama, dari segi aggregate power, Amerika memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia, dengan PDB tertinggi secara global serta anggaran militer yang melampaui negara lain. Hal ini menunjukkan dominasi absolut dalam kapabilitas nasional secara keseluruhan.<sup>21</sup> Kedua, meskipun secara geografis tidak dekat dengan sebagian besar pesaingnya, kehadiran global Amerika melalui jaringan pangkalan militer di Eropa, Asia, dan Timur Tengah menciptakan kedekatan strategis, sehingga tetap dianggap sebagai kekuatan yang "hadir" dan mengancam.<sup>22</sup> Ketiga, dari sisi offensive capability, Amerika memiliki sistem militer yang mampu melakukan proyeksi kekuatan lintas benua, dengan kapal induk, rudal jarak jauh, dan kekuatan udara strategis, yang semuanya mendukung kemampuan intervensi militer secara global.<sup>23</sup> Keempat, aggressive intentions tercermin dari sejarah intervensi militer sepihak, seperti invasi ke Irak pada 2003, intervensi di Libya 2011, dan peran aktif dalam konflik Suriah, yang memicu persepsi bahwa Amerika bukan hanya memiliki kekuatan, tetapi juga kehendak untuk

---

<sup>20</sup> Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances*, 21–26.

<sup>21</sup> Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, *World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy* (Princeton: Princeton University Press, 2008), 3.

<sup>22</sup> John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, updated edition (New York: W. W. Norton, 2014), 140.

<sup>23</sup> Barry R. Posen, *Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy* (Ithaca: Cornell University Press, 2014), 52–53

menggunakannya.<sup>24</sup>

Dalam konsep Threat Perception menurut Stephen M. Walt, terdapat dua konsep kunci dalam teori hubungan internasional yang merupakan strategi negara dalam merespon ancaman atau kekuatan negara lain, yaitu balancing dan bandwagoning. Secara definisi, balancing adalah sebuah strategi negara dalam membentuk aliansi untuk melawan kekuatan ancaman yang dominan, tujuannya untuk mencegah dominasi oleh negara kuat/agresif dan menjaga keseimbangan kekuatan di sistem internasional, NATO merupakan contoh konkrit dari balancing dimana sengaja dibentuk untuk menyeimbangkan ancaman Uni Soviet selama Perang Dingin.<sup>25</sup> Adapun bandwagoning yang merupakan strategi sebuah negara yang justru memilih mendekat atau bersekutu dengan negara yang dianggap sebagai ancaman disbanding menjadi lawan. Tujuannya tidak lain untuk menghindari konflik secara langsung dan mendapat perlindungan, manfaat, atau bagian dari keuntungan yang dimiliki negara kuat. Sebagai contoh, beberapa negara kecil mendukung Nazi Jerman atau AS Uni Soviet dalam Perang Dunia karena merasa tidak mampu melawan, dan kemudian terdapat negara-negara yang mendekat ke Tiongkok karena ingin mendapat investasi dan menghindari konflik ekonomi/politik.<sup>26</sup> Indonesia memandang dominasi negara-negara Barat dalam sistem keuangan, ekonomi, dan politik global sebagai bentuk tekanan structural (*soft aggression*) yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan ruang kebijakan nasional. Oleh karena itu, BRICS diposisikan sebagai alternatif blok kekuatan untuk menyeimbangkan

---

<sup>24</sup> Stephen M. Walt, *The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018), 101–102.

<sup>25</sup> Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances*, 17.

<sup>26</sup> Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances*, 21–23.

pengaruh tersebut.<sup>27</sup>

Aliansi BRICS mencerminkan strategi balancing terhadap sistem internasional yang dipersepsikan tidak adil dan terlalu didominasi oleh negara- negara Barat. Negara-negara BRICS tidak secara langsung melawan kekuatan militer Barat, melainkan merespons persepsi ancaman dalam bentuk dominasi ekonomi, keuangan, dan representasi politik global. Inisiatif seperti pendirian New Development Bank, dorongan penggunaan mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, serta seruan reformasi lembaga multilateral seperti PBB menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan pengaruh global yang dianggap hegemoni.<sup>28</sup>

Hal ini sejalan dengan konsep balancing behavior yang dijelaskan oleh Stephen M. Walt, di mana aliansi terbentuk karena negara-negara merespons ancaman yang mereka persepsikan bersama, bukan hanya kekuatan objektif.<sup>29</sup> Dalam konteks ini, BRICS bukan bentuk bandwagoning terhadap Tiongkok atau Rusia, tetapi merupakan forum strategis bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi tawarnya terhadap kutub kekuatan global baik Barat maupun Timur.<sup>30</sup> Konsep Threat Perception dalam teori Balance of Threat yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt sangat relevan untuk menjelaskan langkah Indonesia dalam bergabung dengan BRICS. Dalam bukunya *The Origins of Alliances*, Walt menjelaskan bahwa negara-negara tidak semata-mata membentuk aliansi berdasarkan kekuatan militer lawan, melainkan berdasarkan persepsi

---

<sup>27</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pidato Menteri Luar Negeri RI pada Sidang Umum PBB ke-78, 23 September 2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4945/pidato/pidato-menlu-ri-pada-sidang-umum-pbb-ke-78>.

<sup>28</sup> BRICS, "About The new Development Bank," diakses 23 Juli, 2025, <https://www.ndb.int/about-us/overview/>.

<sup>29</sup> Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances*, 25–26.

<sup>30</sup> BRICS 2023 Summit, "Johannesburg II Declaration," August 24, 2023, <https://brics2023.gov.za/wp-content/uploads/2023/08/Johannesburg-II-Declaration.pdf>

terhadap ancaman, baik yang bersifat langsung maupun struktural dalam sistem internasional.<sup>31</sup>

Dalam konteks ini, Indonesia memandang dominasi negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan sekutunya dalam sistem keuangan dan politik global sebagai bentuk tekanan struktural terhadap kedaulatan ekonomi dan ruang kebijakan nasional. Dominasi dolar AS, ketimpangan akses terhadap pendanaan global, serta keterwakilan yang tidak adil dalam lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB, menjadi contoh dari persepsi ancaman yang bersifat non-militer namun signifikan secara strategis.<sup>32</sup> Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, BRICS dipandang oleh Indonesia bukan sebagai blok tandingan semata, tetapi sebagai strategi balancing untuk menciptakan tatanan global yang lebih multipolar dan inklusif. Pembentukan New Development Bank (NDB) sebagai alternatif IMF dan Bank Dunia, upaya mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, serta seruan reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bentuk nyata dari strategi balancing yang digambarkan Walt.<sup>33</sup>

Lebih lanjut, keputusan Indonesia untuk bergabung ke BRICS tidak bisa dianggap sebagai tindakan bandwagoning terhadap kekuatan seperti Tiongkok atau Rusia namun sudah pasti balancing terhadap kekuatan Barat. Justru, langkah ini menunjukkan upaya Indonesia memperluas pilihan strategisnya sambil mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak bergabung karena tunduk pada satu kutub kekuatan,

---

<sup>31</sup> Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1987), 21–26.

<sup>32</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024*, diakses 23 Juli 2025, <https://kemlu.go.id>

<sup>33</sup> BRICS, “About the New Development Bank,” diakses 23 Juli 2025, <https://www.ndb.int/about-us/overview/>.

melainkan untuk memperkuat posisi netral terhadap semua bentuk dominasi global yang dipersepsikan sebagai ancaman struktural.<sup>34</sup>

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji alasan Indonesia bergabung dengan BRICS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk bergabung dengan BRICS di tengah ancaman dan konstelasi geopolitik AS dan negara-negara BRICS. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat mencapai keuntungan setelah bergabung BRICS dan tantangan yang akan di hadapi.

### **1.8.1 Batasan Penelitian**

Adapun batasan penelitian ini adalah dampak geopolitik bagi Indonesia setelah bergabung dengan BRICS. Penelitian ini hanya membatasi penulisan tentang dampak yang terjadi serta konstelasi geopolitik global yang terjadi yang berarti terhitung pada Januari 2025 dimana Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS hingga saat penelitian ini berlangsung.

### **1.8.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga internasional,

---

<sup>34</sup> BRICS 2023 Summit, “Johannesburg II Declaration,” 24 Agustus 2023, <https://brics2023.gov.za/wp-content/uploads/2023/08/Johannesburg-II-Declaration.pdf>

dokumen resmi pemerintah, serta publikasi dari organisasi internasional yang berkaitan dengan dinamika geopolitik global dan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi literatur yang memiliki keterkaitan dengan konsep Balance of Threat, politik luar negeri Indonesia, serta perkembangan BRICS sebagai aktor dalam sistem internasional. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber data daring seperti laporan berita internasional dan publikasi resmi untuk memperoleh informasi terkini terkait bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak menggunakan data primer, sehingga fokus utama terletak pada pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data sekunder yang telah tersedia. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti

### **1.8.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan alasan Indonesia bergabung dengan BRICS. Selanjutnya, data yang telah diseleksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi data dengan menggunakan kerangka teori Balance of Threat dari Stephen M. Walt. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana persepsi ancaman terhadap dominasi Barat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, serta bagaimana keanggotaan dalam BRICS dapat dipahami sebagai bentuk strategi balancing.

Dengan demikian, teknik analisis ini tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan penjelasan analitis yang menghubungkan data empiris dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian

#### **1.8.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai alur pembahasan skripsi secara keseluruhan. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: LANDASAN, SEJARAH, DAN KEBIJAKAN**

Bab ini membahas mengenai konsep dasar politik luar negeri Indonesia, perkembangan historisnya dari masa Orde Lama hingga Reformasi, serta implementasi kebijakan luar negeri dalam konteks hubungan internasional.

### **BAB III BRICS: SEJARAH, STRUKTUR, TUJUAN ORGANISASI, DAN DINAMIKA KERJA SAMA**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pembentukan BRICS, struktur organisasi, tujuan kerja sama, serta peran BRICS dalam tatanan global.

### **BAB IV ANALISIS BERGABUNGNYA INDONESIA DENGAN BRICS**

Bab ini merupakan bagian inti penelitian yang membahas hasil analisis dengan menggunakan kerangka teori Balance of Threat, serta mengkaji alasan dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pembuat kebijakan.

#### **1.9 Unit dan Level Analisis**

Unit analisis adalah objek yang akan di analisis dalam penelitian. Pada penelitian ini adalah Indonesia, adapun unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah bergabungnya Indonesia keanggotaan BRICS. Di dalam hubungan internasional tingkat analisis atau unit analisis dalam bentuk yang sederhana terbagi kedalam tiga level yaitu sistem internasional, negara dan individu. Dalam hal ini penelitian menggunakan level analisis di tingkat sistem internasional. Level analisis dalam penelitian ini adalah level sistem internasional yang melihat posisi Indonesia dalam sistem global serta konstelasi geopolitik AS dan negara-negara BRICS yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Ini mencakup hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota BRICS, tantangan dari dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global, serta tekanan atau respons dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat

dan Uni Eropa. Persaingan global antara kekuatan ekonomi seperti AS, Tiongkok, dan Rusia juga berperan dalam membentuk konsekuensi geopolitik bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan yang menjadi unit analisis penulis adalah dampak geopolitik Indonesia bergabung dengan BRICS.

